

PROSIDING

**SIMPOSIUM NASIONAL VI
ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA
(AsIAN) TAHUN 2016
4-6 JULI 2016**

**PERAN ADMINISTRASI NEGARA/ PUBLIK
DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA
UNTUK MENGHADAPI MEA**



**ASEAN
Economic
Community**



Principal Organizer

Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)

Host

Universitas Diponegoro Semarang

Join Organizer

Universitas Tidar Magelang

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Universitas Sultan Fatah Demak



**Kerjasama Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Universitas Diponegoro Semarang,
Universitas Tidar Magelang, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, dan
Universitas Sultan Fatah Demak**

BAGIAN 2

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

- KEBUJAKAN DAYA SAING BANGSA : PERLAWANAN KETIDAKSETARAAN
GENDER DALAM RANTAI DAGANG UNDANG LINTAS NEGARA DI
KALIMANTAN UTARA**
Inda Kartati, M.Si.....135
- DILEMA KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA; ANTARA KEPENTINGAN
PUBLIK DAN BISNIS**
Dr. Bambang Istanto, M.Si.....157
- PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA)**
Edoardus E. Maturbongs, Godefridus Samderubun.....185
- MERINTIS HARAPAN PADA SEKTOR AGRIBISNIS
DI KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT**
Pandhu Yuanjaya.....199
- KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
EKSPOR IMPOR BARANG MENGHADAPI ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)
(STUDI PELINDO KRUENG GEUKUEH)**
Nurhafni.....215
- KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL PERCONTOHAN
PANORAMA UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DI KOTA
BENGKULU**
Sri Indarti, S.Sos, M.Si dan Emma Elyani, SH, MH.....227
- ## **BAGIAN 3**
- ### **PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**
- HUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA (KASUS
DI KABUPATEN KONAWA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**
Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.....237
- STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME BIROKRASI MELALUI
INTENSIFIKASI BATAS USIA PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA**
Arge Pambudi.....251

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Ekspor Impor Barang Menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) (Studi Pelindo Krueng Geukueh)

Nurhafni
Jurusan IAN fisip Unimal
nur_afni82@ymail.com

Abstrak

Asean Free Trade Area (AFTA) dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Yang diperkuat oleh peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tujuan peraturan tersebut untuk memperkuat ekonomi daerah diluar pulau Jawa. Selama ini pelabuhan Krueng Geukueh sudah diatur oleh peraturan pendukung ekspor impor, namun sayangnya pelabuhan tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan, padahal banyak komoditas masyarakat yang disekitaran pelabuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku ekspor. Teori yang akan digunakan adalah Teori kebijakan teori dampak kebijakan atau program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam atau *depth interview*, dengan menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menginterpretasikan bahwa belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang strategi Pelabuhan yang diimplementasikan dalam kebijakan untuk menghadapi MEA, sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak pelabuhan untuk memformulasikan suatu kebijakan bersama. Pasca Tsunami Tahun 2005-2006. Pemerintah Aceh pernah membuat kebijakan gubernur yang diteruskan ke pelindo 1 di Medan yaitu tentang Pembebasan Biaya administrasi Pelabuhan Itu Cuma 1 kebijakan yang pernah dibuat oleh pemerintah daerah Aceh, namun sayangnya sampai sekarang belum ada kebijakan lanjutan

Keyword: Implementasi kebijakan, ekspor impor barang dan peningkatan ekonomi masyarakat

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan bagian dari peluang untuk pelabuhan Krueng Geukueh dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mengekspor komoditas masyarakat. ditambah dengan peraturan yang dikeluarkannya Permendag RI Nomor 83/M-DAG/PER/2013 yang meningkatkan status pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pelabuhan impor untuk 840 jenis produk (Serambi Indonesia, 18/10/2013).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai instrumen daya saing nasional, yang diharapkan dapat menarik investasi melalui insentif fiskal maupun nonfiskal untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat (terutama pada sektor-sektor yang strategis), KEK diharapkan akan memberikan insentif bagi pembangunan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah tersebut. Kedua, rendahnya daya saing Indonesia untuk menarik investasi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal tersebut membuka jalan lebar dan potensi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha bukan hanya dari pasar nasional namun juga pasar internasional ASEAN. Pelabuhan Krueng Geukueh menjadi satu diantara sembilan pelabuhan lain di Indonesia yang diberikan izin untuk mengimpor produk-produk tertentu, (Bisnis Aceh.com, 22/10/2013).

Sejak tahun 2013 manajemen pengelolaan pelabuhan Krueng geukueh seperti tidak tersistem. "Kapal-kapal enggan masuk, karena waktu pulang tidak tahu apa yang bisa dibawa dari Aceh. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus akan menjadi suatu Kekhawatiran pembangunan dalam menghadapi global, Aceh justru akan menjadi sasaran empuk produk-produk dari negara-negara Asean selain Indonesia, saingan sumber daya manusia (SDM) bukan lagi amtar orang Aceh dan Indonesia tetap dengan masyarakat global. (<http://aceh.tribunnews.com>, akses 20 April 2016).

Kemajuan pertanian masyarakat Aceh sering kali tidak didukung oleh kebutuhan pasar, sehingga membuat jatuhnya harga-harga produk-produk komoditas pertanian. Beberapa sebabnya adalah melimpahnya suatu hasil komoditas pada setiap panen. keseragaman pola tanam dengan komoditas yang sama, banyaknya tumbuh agen-agen (toke), kebiasaan masyarakat melepas hasil produk pertanian dengan harga rendah yang membuat fluktuatifnya harga produk pertanian, peran pemerintah yang masih minim, dan banyak program yang dilakukan belum tepat sasaran, ini juga akan mengha-

pertumbuhan ekonomi pertanian masyarakat padahal bersama bahwa ~~sektor pertanian~~ merupakan denyut nadi kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh.

1.2. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Dahlan Abdullah (2015:24) dengan judul *Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe* dalam menjalankan sistem informasi pegawainya masih menggunakan *Microsoft Excel* dalam pendataan dan pelaporan aktivitas pelayanan kapal. Menurut Dahlan data data kapal tidak tersimpan dengan rapi dalam database. Karena setiap kapal yang datang dan keluar selalu sama, seharusnya pegawai pelabuhan menggunakan sistem informasi agar pekerjaan yang berulang-ulang dapat terhindari.

Kolerasi penelitian D. Abdullah sangat mendukung dijadikan sebagai data awal dalam merekayasa penelian ini Model Pelabuhan Krueng Geukuh dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Datarang Tinggi Aceh. di Era *Asean Free Trade Area (AFTA)*. karena hasil penelirian D. Abdullah menemukan adanya kelemahan SDM karyawan Pelabuhan Krueng Geukueh, penelitian ini akan mencari model yang lebih cocok untuk menutupi kelemahan yang ada di pelabuhan Krueng Geukueh sehingga bisa menjadi pintu bagi meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh pada umumnya.

Penelitian Abu Bakar Karim (2012) dengan judul *Ekonomi Lokal Melalui Revitalisasi Kebun Kopi Rakyat di Dataran Tinggi Gayo*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan efisensi rantai penjualan dapat ditempuh melalui: 1) Membagi keuntungan secara adil antara pedagang dan petani; 2) Memfasilitasi lahirnya pedagang/eksportir baru yang mempunyai daya saing; 3) Memfasilitasi bantuan modal untuk pedagang/eksportir. Prinsip agribisnis haruslah berbagi keuntungan secara adil antara pedagang dan petani. Oleh karena itu harus lahir para eksportir dari kalangan petani kopi, agar eksportir memahami proses produksi mulai dari persiapan lahan hingga menjadi biji kering siap untuk diekspor.

Korelasi penelitian yang dibuat oleh Abu bakar dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam melihat hasil pertanian masyarakat Aceh dan pemasaran yaitu mengekspor hasil pertanian. Namun dalam penelitian Abu Bakar tidak melihat proses dari sebuah pembangunan, artinya Abu Bakar lebih melihat secara agribisnis. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis buat sekarang ini yaitu, melihat bagaimana proses

~~Pembangunan~~ yang ada di masyarakat dan pendukung kongkrit yaitu pelabuhan Krueng
~~Gambut~~ yang akan mendampingi pemasaran produk masyarakat Dataran Tinggi Aceh.

1.3. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut *W. Dunn*, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Sedangkan *James E. Anderson* Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memberikan kontribusi kepada keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu kebijakan. Outputs dapat dengan mudah dihitung, dijumlah, dan dianalisis secara statistik. Policy outcomes (seringkali disebut hasil), sebaliknya merupakan konsekuensi terhadap masyarakat, yang mau tidak mau, juga yang berasal dari tindakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung.

Kemudian *Soedijanto (1996)*, menyatakan: evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai. Evaluasi merupakan proses mengumpulkan data yang sistematis untuk mengetahui efektifitas program. Pada dasarnya pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai misi memaksimalkan efektivitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan Pengelolaan pelabuhan diharapkan adanya pencapaian kesejahteraan rakyat secara cepat dan seoptimal mungkin, serta mampu mengurangi disparitas antar daerah minimal, maka diperlukan manajemen pengelolaan pelabuhan yang sinkron dan terpadu.

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, Analisis terhadap masalah Deskripsi dan Standarisasi kegiatan.

1.3.1 Politik modernisasi

David Apter (1965) menyajikan sebuah tipologi pemerintahan dan teori perubahan. Pendekatan bergerak menuju bentuk analisis kebutuhan fungsional-struktural yang lebih berdaya terap, sesuai bagi analisis politik, mengikuti tradisi yang pertama kalinya diasosiasikan dengan *Talcott Persons*. After membedakan pembangunan dan modernisasi. Pembangunan, secara umum, merupakan hasil pertumbuhan dan integrasi peran-peran fungsional dalam sebuah komunitas. Modernisasi adalah satu kasus khusus dalam pembangunan.

Modernisasi menyiratkan tiga kondisi-sebuah sistem sosial yang dapat secara konstan menemukan hal-hal baru tanpa tercerai-cerai, terbedakan, struktur-stuktur

yang fleksibel; dan suatu kerangka kerja sosial untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat hidup dalam dunia dengan kemajuan teknologi. Industrialisasi, sebuah aspek khusus modernisasi, dapat dikatakan sebagai periode dalam sebuah masyarakat di mana peran-peran fungsional strategis dihubungkan dengan proses manufaktur. (1965: 67)

Menurut Apter sistem rekonsiliasi akan membawa pada "nilai-nilai kesempurnaan" (*consummatori*) dan ada pencarian kemanusiaan dengan pengucilan individu. "setelah kehilangan basis, masyarakat kita terancam menjadi sebuah sistem penjarah yang terorganisir dimana makna hanya diturunkan dari perolehan pribadi. keterlibatan sekedar pemertaraan anarki, dan dimensi konsep kemanusiaan tidak lebih dari sekedar nilai fungsional individu" after (1965: 426).

Di sisi lain, ia berasumsi bahwa sistem rekonsiliasi akan memetik keuntungan dari ilmu dan ilmu tersebutlah yang akan membangkitkan kembali demokrasi. "etika ilmiah didasarkan pada kebutuhan pertukaran bebas antara pengetahuan dan informasi. Ini diperlukan terutama dalam masyarakat yang sedang menjalankan modernisasi, dimana, meskipun jumlah kecil, para ilmuwan, para ilmuwan sosial, dan para teknisi merupakan pendorong modernisasi" (1965: 436). After menggambarkan etika ilmiah ini dalam pengertian rasionalitas dan riset empiris. "semangat ilmiah adalah basis sebuah ideologi yang mendorong sebetulnya identitas bagi mereka yang menganutnya dan sebetulnya solidaritas bagi anggota masyarakat di tengah-tengah perubahan" (437).

Korelasi penelitian dengan teori sangatlah penting, argumen peneliti menggunakan teori modernisasi dalam penelitian Model pelabuhan Krueng Geukueh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu ada satu sudut pandang yaitu mengubah pola pembangunan. Menganalisis modernisasi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah. merupakan satu kasus khusus dalam pembangunan. Teori modernisasi akan memperkuat argumen bahwasanya masyarakat dataran Tinggi bagi mempunyai kondisi sosial struktur-struktur yang fleksibel.

Dalam teori ini akan menunjukkan bahwa perlu kerangka kerja sosial untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah. agar dapat mengolah produk pertanian dari model tradisional ke model yang berbasis teknologi. Industrialisasi, yang merupakan sebuah aspek penting dalam teori modernisasi, dalam hal ini teori modernisasi

ini ~~menjadi~~ ~~akan~~ memperkuat bahwa bagaimana upaya agar masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah, memodernisasikan model produksi pertanian tradisional ke model pertanian moderen yang dapat bersaing di tingkat internasional.

1.3.2 Ketidakmerataan Pembangunan

Teori ketidakmerataan pembangunan mengakui beragamnya pola-pola transisi kapitalisme luar dan kapitalisme pusat sebagai konsekuensi dari dampak mode produksi kapitalis dan mekanisme perdagangannya pada formasi-formasi prakapitalis, yang menghasilkan, misalnya, penghancuran seni kerajinan tanpa digantikan oleh produksi industri lokal. Negara-negara belakang jangan dirancukan dengan negara-negara maju pada tahap pembangunan mereka lebih awal, karena negara terbelakang dicirikan oleh ketidakseimbangan distribusi produksi yang ekstrim, yang utamanya melayani kebutuhan pusat yang domina.

Terdapat dua isu yang muncul dalam pembahasan ketidakmerataan secara teoritis. *Satu*, pernyataan menyangkut pembangunan nasional dan internasional. Lebih cenderung interpretasi yang melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem dunia di mana identitas nasional mungkin bergantung padanya. Kelas, produksi, perjuangan, dan transisi kesemuanya harus dianalisis dalam konteks dunia. Dengan demikian, transisi kapitalisme ke sosialisme harus pada tatanan internasional, dan itu dimulai di batas luar.

Isu yang *kedua*, adalah perdebatan menyangkut apakah analisis perlu memperhatikan pertukaran atau produksi. Para penulis seperti Frank Andre Gunder (1966) menekankan pertukaran dan ketidak merataan pasar, sementara menggunakan konsep-konsep seperti metode produksi untuk bergerak melampaui kategori-kategori pasar sambil berfokus pada sistem dunia, pusat, dan batas tepi. Amin mengikuti tradisi marx yang mencatat bahwa krisis dibangkitkan oleh siklus keungan dan perdagangan dalam sistem kapitalis, namun juga berfokus pada perkembangan kapasitas produksi (termasuk teknologi dan akumulasi sumberdaya), yang akan menciptakan kondisi-kondisi, mungkin terdorong oleh krisis-krisis pertukaran ini, membawa pada perubahan. Perbedaan antara produksi dan pertkaran ini telah menyulut perdebatan asal-usul kapitlisme dan transisi dari feodalisme menuju kapitalisme.

1.3.3 Ketidakseimbangan Pembangunan

Gagasan-gagasan ketidakseimbangan pembangunan sebagian merupakan tanggapan terhadap gagasan evolusi dan gradualisme abad kesembilanbelas, yang diasosiasikan dengan para pendukung kemajuan kapitalis, yang memegang pendapat bahwa seluruh masyarakat aktif akan bangkit dari negara prakapitalis menuju sebuah dunia kapitalis borjuis dan persaingan bebas. Peristiwa abad kesuapuluh telah menunjukkan akibat-akibat akumulatif pembangunan kapitalis dunia dan mewujudkan ketidakteraturan yang ekstrim,

Sifat-sifat ketidakseimbangan dan keterpaduan dari pembangunan secara tepat digambarkan oleh George Novack. Untuk ketidakseimbangan pembangunan, Dorongan utama kemajuan manusia adalah kendali manusia atas kekuatan-kekuatan produksi. Ketika sejarah bergarak maju, terjadi pertumbuhan kekuatan-kekuatan produksi yang lebih tepat atau lebih lambat di berbagai segmen masyarakat berdasarkan perbedaan produksi-produksi alami dan hubungan sejarah-sejarahnya. Perbedaan ini mencirikan perkembangannya atau menyusutkan keseluruhan zaman-zaman sejarah dan menanamkan bermacam-macam laju dan batas-batas pertumbuhan pada beragam masyarakat, beragam cabang ekonomi, beragam kelas, beragam institusi sosial dan bidang budaya. Inilah esensi ketidakmerataan pembangunan. [Novack 1966: 5).

Variasi-variasi di tengah berbagai faktor sejarah ini menjadi basis kebangkitan fenomena luar biasa di mana sifat-sifat tahap pembangunan sosial yang lebih rendah menjadi satu dengan yang lebih tinggi. Keterpaduan formasi-formasi ini memiliki ciri yang sangat kontradiktif dan menunjukkan keanehan-keanehan mencolok. Mereka mungkin menyimpang dari aturan dan mengakibatkan suatu gejolak yang menghasilkan lompatan kualitatif evolusi sosial dan memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terbelakang untuk mendahului, dan setelah waktu tertentu, menjadi lebih maju. Inilah makan inti hukum keterpaduan pembangunan. (novack 1966: 6)

1.4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Globalisasi begitu besar pengaruhnya bagi hubungan internasional antar negara. Sistem ekonomi dunia yang cenderung menggunakan prinsip liberalisme pasar menuntut negara-negara di dunia untuk mengintegrasikan ekonomi nasional menuju

sistem perdagangan bebas.¹ Dengan pasar sebesar 620 juta jiwa, ASEAN memberikan akses besar terhadap pemasaran produk dan jasa. Akibat krisis ekonomi politik di belahan dunia lainnya, maka negara-negara Asia Tenggara saat ini menjadi target para investor asing menanamkan modalnya seiring pertumbuhan ekonomi yang relatif fluktuatif di kawasan ini. Oleh karena itu, penerapan AFTA dalam lingkup ASEAN Economic Community merupakan peluang bagi ekonomi Indonesia, khususnya Aceh telah mulai diakomodir dengan dikeluarkannya Permendag RI Nomor 83/M-DAG/PER/2013 yang meningkatkan status pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pelabuhan impor untuk 840 jenis produk.²

Hal tersebut membuka jalan lebar dan potensi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan sayapnya bukan hanya dari pasar nasional namun juga pasar ASEAN. Pelabuhan Krueng Geukueh menjadi satu diantara sembilan pelabuhan lain di Indonesia yang diberikan izin untuk mengimpor produk-produk tertentu.³ Namun, direalisasikannya kebijakan impor barang-barang tertentu ke pelabuhan Krueng Geukueh juga harus memikirkan produk apa yang sebaliknya akan di ekspor?⁴ Bila tidak, para importir juga harus menanggung setengah biaya perjalanan kapal yang telah mengangkut barang impor.

Pemerintah Aceh merespon kebijakan Memperindag RI dengan pelaksanaan peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan krueng Geukueh, agar komoditi pertanian dapat diangkut dengan cepat dan tepat untuk diekspor keluar negeri. Terlepas dari euphoria dibukanya akses perdagangan ekspor dan impor yang lebih lebar, tantangan Provinsi Aceh setelah berlakunya AFTA 2015, bukan hanya barang yang akan bergerak bebas dalam kawasan regional, namun juga tenaga kerja. Indonesia dan Aceh khususnya, harus meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, jasa dan SDM-nya agar lebih kompetitif dalam pasar Asia tenggara.

Apabila hal ini tidak dimaksimalkan oleh Pemerintah Aceh, maka masyarakat hanya akan menjadi “konsumen”, bukannya menjadi “produsen” pasar bebas ASEAN. Selain itu, hal tersebut akan dapat mematikan ekonomi lokal apabila produk-produk

¹ (Suara Merdeka, 8/12/2013).

² (Serambi Indonesia, 18/10/2013)

³ (BisnisAceh.com, 22/10/2013).

⁴ Serambi Indonesia, Salam, 21/10/2013

tidak dapat mampu bersaing dengan masuknya barang, jasa dan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya yang lebih berkualitas dan lebih murah. Walaupun diimplementasikan dalam label "liberalisasi", pembenahan infrastruktur pendukung perekonomian harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh, baik pengelolaan SDA dan lain-lain, agar tercapainya efisiensi pengelolaan ekonomi yang memberi peluang bagi usaha Aceh untuk memanfaatkan momen ini dan bermain di level yang lebih tinggi. Semua itu, tentu saja, ditujukan untuk peningkatan kemakmuran masyarakat Aceh seluas-luasnya.

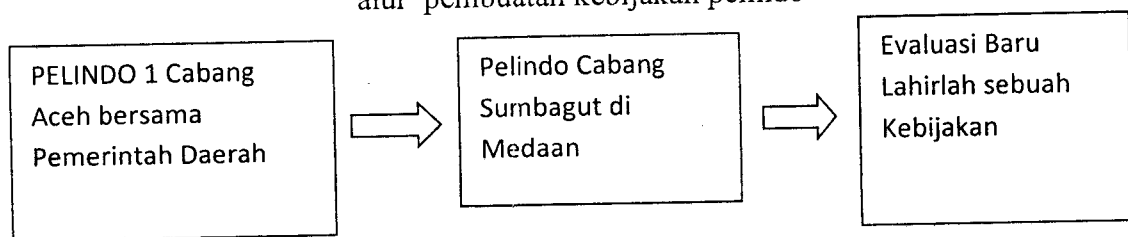
Menurut Iskandar Usman Al Farlaky, anggota Komisi I dan juga Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA adalah sebagai berikut: Berdasarkan wawancara dengan Iskandar Usman Al Farlaky beliau menilai bahwasanya Aceh belum siap hadapi MEA, hal ini akan menjadi pasar bagi produk luar negeri. Karena produk asing diminati warga Indonesia. Selain itu, dari sektor ketenagakerjaan, masyarakat yang siap secara kemampuan akan bekerja untuk perusahaan asing, serta tenaga kerja yang ingin masuk ke suatu wilayah tidak dapat di bendung.

Hampir 90 persen bahan kebutuhan sandang pabrik di Jakarta bukan di Sumut. Maka diupayakan pengangkutannya menggunakan jalur laut, melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. Sehingga tidak parsial lagi menggunakan jalur darat yang menghabiskan biaya yang besar. Selain itu kontainer kosong dari Aceh, nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengangkut produk dari Aceh. Jika fungsi pelabuhan berjalan dengan baik, otomatis produk dari Aceh juga bergerak dengan cepat. Termasuk Pelabuhan Kuala Langsa yang akan dijadikan salah satu pelabuhan curah cair CPO (Crude Palm Oil), untuk mengangkut minyak sawit mentah dari pabrik kelapa sawit di Aceh.

Faktor penghambat implementasi ekspor impor barang di pelabuhan krueng geukueh belum adanya qanun tentang pelarangan barang dari Aceh dikirim melalui belawan, sehingga banyak pengusaha aceh yang memilih medan sebagai daerah perdagangan tempat memasukkan dan mengeluarkan barang, hal ini berdampak pada PAD kota menurun dan Perekonomian Masyarakat sekitar melemah, terjadinya inflasi, contoh Pengiriman Hasil Kebun Sawet dikirim melalui pelabuhan belawan, hal ini juga disebabkan intervensi politik di aceh yang masih tinggi yang menyebabkan para pengusaha aceh memilih belawan sebagai tempat dermaga pemasukan maupun pengeluaran barang. Ini yang seharusnya menjadi inisiatif oleh pemerintah daerah.

Peraturan daerah atau Qanun tentang Pelabuhan tidak ada, yang ada aturan dari Pusat tentang Pelabuhan yang dituangkan ke seluruh cabang pelabuhan, Jenis Pelabuhan Krueng geukueh masih Pelabuhan Domestik yang menyediakan Jasa Berlabuh, Jasa Tambat Dermaga, Jasa Alat Berat. Sedangkan Jasa Bongkar Muat itu diatur Oleh Syah Bandar. Pihak Pelabuhan hanya menyiapkan tempat. Kapal masuk ke Pelabuhan Krueng Gukuh Rata rata 1 minggu Sekali. Status Pelabuhan kruengeukuh masih tunduk kemedan. Wilayah Pelindo 1 yaitu Aceh Medan dan Riau dengan Kordinator wilayah yaitu Medan, pelabuhan hanya mendapatkan fee jasa Penyediaan tempat Bongkar Muat, sedangkan untuk jenis barang yang bisa masuk ke pelabuhan itu wewenang daripada pihak bea cukai. Kendala dalam Bongkar Muat yaitu Pajak di Aceh dan Intervensi Politik yang sangat tinggi. Sehingga harga barang diaceh relatif lebih tinggi, karena peran dan fungsi pelabuhan tidak dioptimalkan dengan baik, fenomena tersebut dapat dilihat melalui tabe di bawah ini:.

Tabel I.I
alur pembuatan kebijakan pelindo



tabel diatas menggambarkan bahwa pelindo dan pemerintah Aceheterikat dan tunduk kepada prosedural sesuai ketentuan pelindo Sumut, oleh sebab itu Perlu adanya langkah yang strategis mengawalinya dengan melakukan konsolidasi organisasi kedinasan secara internal. Tujuannya agar dapat diketahui secara kongkrit kemana arah yang ingin dicapai. Terutama bagaimana produk-produk unggulan Aceh akan memiliki daya saing pada 2017. Dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam. Selanjutnya menggerakkan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor. Salah satunya menghidupkan fungsi pelabuhan agar terjadi peningkatan nilai perdagangan, dengan cara berkoordinasi dengan Pelindo.

1.4. Rekomendasi

2. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan bersama tentang pelarangan importir ke pelabuhan Belawan,

3. Pemerintah memberi Jaminan Bagi Seluruh Investor baik dari Segi Apapun
4. Pelaku Bisnis dan seluruh Elemen harus taat aturan dan prossedural

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar et.al, *Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah: Lhokseumawa-Aceh*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Unimal Press, 2008.
- Chilcote, Ronald H. *Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom*. Colorado. Westview Press Bolder. 1981.
- Dahlan Abdullah. Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kapal DI PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Cabang Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan. ISSN : 2407 - 3911 Volume I, No 2, 30 April 2015*
- David E. Apter, *The Politics of Modernization*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1965, Ch. 10. *The Mobilization System as a Modernization Prototype.*
- Frank, Andre Gunder. *The Development of underdevelopment*. New York. Monthly Review Press. 1966.
- Islamy. M Irfan 2001 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Karim, Abubakar. "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Revitalisasi Kebun Kopi Rakyat di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah. Local Economic Development Through Revitalization of Coffee Small-holder in Gayo Highland)" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan ISSN: 0852 - 9124 Vol. 3 No.1. (2012)*
- Novack, G. (1974). *Understanding History*. New York : Pathfinder Press. 1966.

Internet

- Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pelabuhan impor untuk 840 jenis produk (Serambi Indonesia, 18/10/2013). Akses 23 Maret 2016.
- BisnisAceh.com, www.serambnews.com 22/10/2013. Akses 23 Maret 2016.
- Serambi Indonesia, Salam, www.serambinews.com 21/10/2013. Akses 24 Maret 2016.
- Ekspor Import Pertama Pelabuhan Krueng Geukueh
<http://aceh.tribunnews.com/2015/12/22>. Akses 24 Maret 2016.